

## INDUSTRIALISASI DI GEMEENTE BLITAR, 1900-1942

Oleh: Nurhadi Sasmita  
Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember

### ABSTRACT

*Political victory of the Liberalist in Dutch Parliement gave rise to the change in Nederlandsch Indië. This can be seen from the establishment of Agricultural Act and Sugar Act in 1870. The implementation of this acts opened an opportunity of European businessman to grow the business in plantation industry. Industrialization in Blitar was basically both rural based industries and urban based industries. Rural based industries were developed plantation in Blitar Regency and Gemeente Blitar took part as the centers of controlling agencies, communications, and distribution of rural based industry products. Urban-based industries in Gemeente Blitar included service industries, utility industries, construction industry, small manufacture industries. Industrialization in Gemeente Blitar experienced dynamic fluctuative situation because of natural disasters, a problem that could not be solved quickly, the head office of a big company is outside of Blitar. Industrialization effect in Blitar are: the opening of isolated areas, sosial segregation, industrial conflict, new space layout and kampongsverbetering, social economic, establishment of the new institutions and new local regulations. Specially for the city space layout, gouvornment was not entirelyly succesfull, because: natutral disasters, there was not utility and constructions company based in Blitar, colonial governments attitude was not serious to develop Gemeente Blitar.*

**Key words:** *industry, industrialization, Gemeente Blitar.*

### I. PENDAHULUAN

Kemenangan politik kaum liberal di Parlemen Negeri Belanda melahirkan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula (1870). Jumlah kapital mereka bertambah banyak dan mereka mulai berpikir untuk melakukan perluasan usaha di wilayah tanah jajahan. Kepentingan ekonomi kaum borjuasi tersebut telah disokong oleh merebaknya ide liberalisme di Belanda. Dalam bidang ekonomi, gagasan ini merupakan kritik atas peran negara dalam mengatur lalu lintas pasar. Dalam konteks ini kaum borjuasi kemudian menuntut agar sistem merkantilisme negara digantikan dengan korporasi-

korporasi milik partikulir. Wertheim melukiskan situasi ini sebagai berikut:

*...the bourgeoisie, which have been able to up considerable capital from the profit derived from the cultural system, now looked for investment in the colony. The cultural system, which reserved almost all economic activities to the state, was considered an impediment to the private enterprice....<sup>1</sup>*

Penerapan undang-undang tersebut dan terus meluasnya pengaruh liberalisme berujung pada munculnya perusahaan perkebunan dan pertambangan partikulir besar di Jawa dan Sumatra. Akibatnya struktur penguasaan modal juga mulai bergeser

dengan tampilnya kelas borjuasi sebagai penopang utama bagi kinerja kapitalisme perusahaan perkebunan itu. Basis modal golongan ini semakin kuat seiring dengan keberhasilan mereka dengan mengkonsentrasikan modal dalam berbagai usaha industri.

Belanda memiliki alasan kuat untuk membentuk *gemeente*, meskipun sebenarnya secara geografis Blitar adalah sebuah daerah kecil dan relatif terisolasi, seperti diakui oleh *Burgemeester* Blitar, J.H. Boerstra.<sup>2</sup> Alasan-alasan tersebut menjawab pertanyaan mengapa Blitar dibentuk sebagai *gemeente*. Setelah berhasil membentuk *Gemeente* Blitar, Belanda mengaturnya dengan cara-cara dan peraturan secara lebih komprehensif. Atas dasar tersebut di Blitar disediakan kantor-kantor pemerintahan, stasiun kereta api, gardu induk listrik, gereja, kebon raja (taman kota), sekolah, rumah sakit, penataan kota, pembangunan jalan dan irigasi, dan simbol-simbol kota lainnya. Hal-hal tersebut tentu berdampak terhadap kehidupan masyarakat setempat, yakni terjadinya proses penyesuaian diri (dari beberapa kelompok) penduduk dalam situasi dan kondisi kolonial, terjadinya kontak kultural antara kekuatan tradisional dan kekuatan kolonial. Dalam proses tersebut terjadi banyak sekali proses kreatif atau proses destruktif dalam hubungan dialektik antara penguasa kolonial dan penduduk di negeri jajahan bermula dari kota.<sup>3</sup> Karena memerlukan kemampuan teknis serta organisasi yang dibutuhkan oleh penguasa lokal (*gemeente*), para penduduk (bumiputera) tidak dapat berpartisipasi dalam mengambil keuntungan dari kota (baru) itu,<sup>4</sup> terutama dalam industrialisasi yang memerlukan ketrampilan dan tingkat pendidikan tertentu para penyelenggaranya. Dinamika dalam proses tersebut yang menjadi perhatian

dan permasalahan pokok dalam artikel ini.

Ruang lingkup artikel ini meliputi lingkup kajian (sejarah sosial dan ekonomi), lingkup wilayah (*Gemeente* Blitar), dan lingkup waktu (1900-1942). Industri dipilih untuk mengembangkan perekonomian Belanda sebab dinilai mampu memberikan keuntungan lebih banyak. Dengan industrialisasi maka Belanda akan dapat melakukan eksploitasi lebih besar terhadap kekayaan alam Hindia Belanda. Setelah Jepang berkuasa, langkah Belanda dalam pengembangan industri terhenti.

Secara historis, perkembangan industri sudah dimulai sejak sebelum datangnya orang Eropa.<sup>5</sup> Pertama, di desa-desa banyak terdapat kerajinan rumah, yakni para petani yang membuat sendiri berbagai alat yang diperlukannya. Jenis industri ini telah sangat lama dikenal dan dikembangkan masyarakat. Kedua, adalah industri rumahan tersebut sering kali juga menghasilkan barang-barang untuk dijual sebagai tambahan penghasilan bagi keluarga (petani) di daerah pedesaan. Ketiga, adalah kerajinan tangan dengan cara produksi yang didasarkan atas pesanan para pelanggan, seperti tukang kayu, penjahit, maupun pandai besi. Keempat, adalah pengolahan (*manufacture*) yakni tempat-tempat bekerja dengan para pekerja yang dipimpin oleh pemilik perusahaan. Semula belum menggunakan peralatan mesin maupun elektrik, tetapi mengandalkan pekerjaan tangan, misalnya perusahaan rokok, tenun, dan batik. Kelima adalah pabrik, yakni tempat bekerja bersama-sama dengan menggunakan tenaga mesin maupun listrik.<sup>6</sup>

Pengertian istilah industri sama dengan sektor sekunder dalam tata masyarakat. Industrialisasi adalah perkembangan dalam pembagian suatu

tata masyarakat atas sektor primer, sekunder dan tersier, dimana prosentase sektor sekunder meningkat dan dibebankan pada sektor primer. *Sektor primer*, meliputi pertanian dan perikanan; *sektor sekunder*, meliputi kegiatan industrial; sedang *sektor tersier*, meliputi perdagangan, jasa, dan pengangkutan.<sup>7</sup> Ketiganya menjadi bagian integral dalam industri.

Ciri utama industri adalah penerapan teknologi modern, mulai dari yang paling awal (dalam pertanian misalnya pengolahan tanah dan pembibitan) sampai pada pengolahan hasil pertanian. Penerapan teknologi modern juga ditandai dengan pemakaian alat-alat modern (antara lain berupa alat-alat mekanik), serta mengarah dalam bentuk perusahaan dalam skala lebih besar, sehingga melibatkan pengusaha (pemilik modal), sarana dan prasarana, buruh, bahan mentah, pengolahan, dan distribusi.<sup>8</sup> Industri dapat dibedakan menjadi *rural-based industries* dan *urban-based industries*.<sup>9</sup> *Rural-based industries* terdiri atas pertanian dan perkebunan, termasuk di dalamnya peternakan dan perikanan. *Urban-based industries* terdiri atas industri pengolahan atau manufaktur, transportasi, telekomunikasi (pos, telegraf, dan telepon), *utility* atau perusahaan umum, konstruksi, jasa-jasa lainnya.

Selain itu, usaha industri modern harus memenuhi persyaratan tertentu yang amat berbeda dengan usaha secara tradisional. Industri sebagai bidang usaha harus bekerja secara melembaga, sehingga keberadaannya harus bersifat formal. Usaha industri harus memiliki ijin, produk sebagai hasil usaha, diperlukan manajemen yang menggerakkan seluruh aktivitasnya, seluruh aktivitasnya tercatat secara tertib dan teratur dalam kurun waktu tertentu mulai dari perencanaan sampai

pencapaian hasil, distribusi dan pemasaran produknya. Industri dengan kapasitas besar dan produk khusus memerlukan lokasi tertentu, serta harus dapat menjaga keseimbangan, keamanan, serta ketertiban di lokasi tersebut.<sup>10</sup>

Industrialisasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kolonial dan pihak swasta di Blitar menunjukkan dinamika cukup menarik, baik yang menyangkut ragam industri maupun tingkat produksi. *Rural-based industries* yang terdapat di *Gemeente* Blitar dalam skala kecil dan diusahakan oleh rakyat di seluruh desa berupa pertanian rakyat. Usaha ini dijalankan oleh masyarakat kebanyakan secara tradisional dan turun-temurun, sehingga ciri tradisional dan cara-cara sederhana mewarnai pertanian mereka. Oleh sebab itu data mengenai hal tersebut amat terbatas dan tidak akan dibahas lebih detail dalam artikel ini. Hampir semua *urban-based industries* akan dibahas secara lebih detail meliputi hampir semuanya, terutama yang telah ditemukan sumber datanya. Tidak semua jenis *urban-based industries* dikembangkan oleh Pemerintah Belanda maupun pihak swasta di *Gemeente* Blitar. Beberapa industri yang berkembang di *Gemeente* Blitar antara lain industri pengolahan (manufaktur) berupa pabrik minyak di Sukorejo dan Pakunden, industri jasa transportasi (kereta api), jasa telekomunikasi (pos, telegraf, dan telepon), industri konstruksi (perumahan, perkantoran), dan *utility* (pasar, rumah sakit, listrik, air minum). Proses dialektik itu menjadi landasan analisis dan fokus pembahasan dalam artikel ini

## II. METODE

Artikel ini merupakan hasil penelitian sejarah, sehingga metode yang digunakan adalah metode sejarah,

meliputi empat langkah kegiatan. Pertama, mencari dan mengumpulkan sumber yang relevan dengan topik artikel ini. Dalam hal ini penelusuran arsip dan studi pustaka harus dilakukan untuk memperoleh sumber-sumber tersebut. Kedua, kritik sumber, baik kritik ekstern maupun intern. Ketiga, interpretasi dan sintesis terhadap fakta yang diperoleh. Keempat, historiografi, yakni menuliskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan sejarah.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Akses Menuju Industrialisasi

Secara geografis *Gemeente* Blitar terletak pada koordinat  $112^{\circ}114'$  –  $112^{\circ}28'$  Bujur Timur dan  $8^{\circ}2'$  –  $8^{\circ}10'$  Lintang Selatan. Posisi ini kira-kira terletak 160 Km di sebelah selatan ibu kota Propinsi Jawa Timur (Surabaya). Ketinggian rata-rata adalah 156 meter di atas permukaan laut. Ketinggian di bagian utara sekitar 245 meter dengan tingkat kemiringan  $2^{\circ}$  sampai  $15^{\circ}$ , bagian tengah 175 meter dan bagian Selatan 140 meter dari permukaan air laut dengan tingkat kemiringan  $0^{\circ}$  sampai  $2^{\circ}$ . Dilihat dari topografinya wilayah ini termasuk dataran rendah. Suhu udara berkisar antara  $28^{\circ}$  sampai  $29^{\circ}\text{C}$  dengan tipe iklim C-3, sehingga menjadikan *Gemeente* Blitar sebagai sebuah kawasan yang beriklim relatif sejuk. Salah satu sungai yang mengalir di *Gemeente* Blitar adalah Sungai Lahar sepanjang  $\pm 7,84$  Km. Hulu Sungai Lahar berada di Gunung Kelut menuju ke Sungai Brantas. Beberapa sungai kecil yang melintasi wilayah *Gemeente* Blitar antara lain Kali Cari, Kali Urung-urung, Kali Tugu, dan Kali Gedog. Keadaan tanah di *Gemeente* Blitar berupa tanah regusol dan litusol. Jenis tanah regusol berasal dari Gunung Kelut (vulkan) sedang jenis tanah litusol mempunyai konsistensi gembur, korositas tinggi dan tahan terhadap

erosi.<sup>11</sup> Wilayah sebelah utara sampai di kawasan Gunung Kelut merupakan daerah yang subur. Demikian juga di sepanjang Lembah Brantas, sedang di sebelah selatan lembah itu sebagian daerahnya kering, berupa rangkaian daerah Pegunungan Kapur Selatan. Di kawasan utara dan selatan itu tersedia tanah luas dan kebanyakan berupa hutan.

Faktor pendukung dikembangkannya industri di Blitar antara lain berupa sarana dan prasarana yang terus ditingkatkan. Jalan desa telah tersedia sampai di pelosok pedalaman dan daerah perkebunan. Jalan tersebut kemudian dibangun, dilebarkan dan dikeraskan oleh para pengusaha perkebunan untuk memperlancar transportasi. Jalan raya juga disiapkan oleh Pemerintah Kolonial sampai di pusat kota. Sampai 1923 jalan raya di *Gemeente* Blitar telah dapat menghubungkan daerah di luarnya, lengkap dengan pemberian nama dan kelas jalan.<sup>12</sup>

Pengembangan industri memerlukan tenaga kerja yang terdidik dan terampil. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pemerintah Kolonial mengembangkan pendidikan, dan diperkuat setelah diterapkannya Politik Etis pada 1901. Lembaga-lembaga pendidikan berhasil dibangun di Blitar oleh pemerintah maupun swasta (Cina, bumiputera, dan organisasi keagamaan Islam dan Katholik). Sampai 1920-an telah tersedia sekolah tingkat dasar (ELS, HIS, HCS) sampai tingkat menengah (MULO, Jongens Normaalschool, Meisyes Leerschool), dan sekolah calon pamong praja bumiputera atau OSVIA.<sup>13</sup> Namun demikian pemerintah tidak mendirikan sekolah kejuruan yang sesuai dengan pengembangan industri di Blitar. Sekolah tersebut tersedia di Malang dan Kediri.<sup>14</sup>

Pasar juga telah tersedia di *Gemeente* Blitar yaitu di Pakunden, Pasar Pon, dan yang baru Pasar Legi. Dalam batas tertentu ketiga pasar itu menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan penjualan produk industri.

Akses untuk ekspor dan impor produk industri, *Gemeente* Blitar telah dihubungkan dengan kereta api sejak 1884, melalui Tulungagung-Kediri-Kertosono-Surabaya.<sup>15</sup> Pembangunan jalan kereta api menuju Blitar terkait dengan rencana besar pengembangan jalan kereta api. Pada 1875 rencana itu telah tercantum dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan *Staasspoorweg* dan pelaksanaan pembangunannya ditetapkan dengan *Staatsblad* No. 161/1875, 6 April 1875. Proyek itu mencakup pembangunan jalan kereta api *Buitenzorg-Bandung-Cicalengka* dan *Madiun-Blitar*.<sup>16</sup> Kereta api menjadi pendukung utama distribusi produk industri sampai ke pelabuhan ekspor.

## B. Industrialisasi di Blitar

Industrialisasi di Blitar meliputi *rural based industries* dan *urban based industries*. *Rural based industries* berupa industri perkebunan berada dalam wilayah Kabupaten Blitar. Daerah subur di Blitar yang dikembangkan menjadi pusat industri perkebunan adalah di sekitar lereng Gunung Kelut (Blitar bagian utara) dan lembah Brantas. Pada awalnya terdapat ratusan perkebunan yang berhasil dikembangkan oleh orang-orang Eropa tetapi pada 1939 tercatat 45 perusahaan perkebunan dengan tanaman budidaya kopi, karet, kina, teh, tebu, tembakau, kapuk, singkong, kelapa, dan agave.<sup>17</sup> Perusahaan perkebunan memiliki unit pengolahan sendiri, baik di dalam

kompleks perkebunan maupun di tempat lain. Pembukaan perkebunan dan unit pengolahan itu memperkenalkan pola baru dan kemandirian dalam bertani kepada masyarakat.

*Urban based industries* yang dikembangkan di *Gemeente* Blitar meliputi industri jasa, *utility industries*, industri konstruksi, dan industri pengolahan. Industri jasa meliputi jasa komunikasi, transportasi, hotel, layanan kesehatan (klinik, rumah sakit dan apotek). *Utility industries* meliputi listrik, air bersih, dan penyediaan BBM. Industri konstruksi meninggalkan berbagai bangunan irigasi, jalan dan jembatan, perumahan, taman kota, tempat ibadah, gedung-gedung pemerintahan dan perusahaan, dan sebagainya. Industri pengolahan berupa pabrik rokok dan minyak kelapa.

Industri jasa komunikasi meliputi pos, telegraf, telepon, dan pers. Bukti tertua industri pos adalah sebuah foto kartu pos koleksi KITLV Leiden yang dikirim dari Blitar pada 6 Desember 1877 untuk Charles Kinder Esgrs di Hamberg Jerman. Pada 1881 telah dioperasikan layanan pos di Blitar, dilakukan hubungan pos dengan Kantor Pos Nganjuk yang dibentuk berdasarkan *Staatsblad* No 43/1881, 31 Januari 1881. Layanan yang dilakukan sangat terbatas, dan pada 1882 diperkuat dengan layanan pos kuda yang menghubungkan Nganjuk-Kediri-Blitar yang dibentuk berdasarkan *Staatsblad* No. 174/1882, 15 Juni 1882.<sup>18</sup> Jaringan tersebut terus meluas, antara lain dengan Kantor Pos Pembantu Kertosono<sup>19</sup> dan daerah-daerah lain setelah semakin terbuka dan lancarnya jalur transportasi darat. Jenis selain surat menyurat dan penyediaan berbagai benda pos, juga layanan tabungan dan pengiriman uang.<sup>20</sup>

Jaringan telegraf memasuki Blitar pada 1874.<sup>21</sup> Pada 1874 jaringan itu dihubungkan jalur untuk Kediri ke

Situbondo, juga dibangun jalur sepanjang Blitar, Malang, Lumajang dan Bondowoso.<sup>22</sup> Sejak saat itu di Blitar telah terdapat jaringan telegraf yang menghubungkan dengan beberapa daerah dan memperlancar hubungan komunikasi warganya dengan masyarakat luas di luar Blitar. Kantor telegraf menjadi satu dengan Kantor Pos sehingga bernama Kantor Pos dan Telegraf, berlokasi di Kepanjenkidul.

Jasa telepon tersedia pertama kali di Hindia Belanda pada 1882. Sejak itu sampai dengan 1906 jasa telekomunikasi disediakan oleh perusahaan swasta dengan lisensi pemerintah selama 25 tahun. Pada 1906, Pemerintah Kolonial Belanda membentuk departemen yang mengendalikan semua jasa pos dan telekomunikasi di Hindia Belanda.<sup>23</sup> Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan pemerintahan yang semakin dinamis, Pemerintah Kolonial membangun jaringan telepon di *Gemeente* Blitar.<sup>24</sup>

*Urban based industries* yang cukup penting bagi pertumbuhan sektor industri adalah industri pers. Pers juga berperan penting dalam kehidupan masyarakat kota. Keberadaan pers dapat memacu pertumbuhan industri lainnya, karena pers menyediakan iklan untuk sarana pemasaran.<sup>25</sup> Salah satu ciri pertumbuhan dan perkembangan sebuah kota ditandai dengan penerbitan surat kabar atau majalah. Media publikasi ini dimanfaatkan oleh para pemuda yang aktif dalam pergerakan dan organisasi-organisasi, serta para pengusaha untuk memasang advertensi dagangan atau jasa yang ditanganinya.

Pers yang terbit di *Gemeente* Blitar adalah *Tjondo Berowo*, sebuah majalah yang terbit sebulan sekali, menggunakan bahasa Jawa dan ditulis dengan huruf Jawa. Majalah ini terbit pertama kali pada 1925 di bawah pimpinan redaktur J. Ing Tjiang. Penerbitnya adalah

Soponjono di Blitar, dan substansinya adalah karya sastra dan pengetahuan umum serta kebudayaan (khususnya) Jawa, iklan (advertensi), pengumuman, serta sangat sedikit berita. Sebagian besar iklan ditulis dengan huruf latin, dan dalam bahasa Melayu (Indonesia), serta bahasa Belanda.<sup>26</sup>

Alat transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat Blitar adalah sepeda, gerobak, delman, dan bendi.<sup>27</sup> Sepeda motor dan mobil sedikit sekali pemakainya. Truk digunakan untuk angkutan barang. Perusahaan jasa transportasi yang beroperasi di Blitar adalah milik Tan Kiem Phiau. Dalam kontraknya disebutkan bahwa perusahaan ini bertugas mengangkut kopi pemerintah, uang, dan material lainnya dari wilayah Residensi Kediri ke Surabaya dan sebaliknya, serta mengangkut garam dari Residensi Madura ke gudang-gudang penyimpanan di Kertosono, Nganjuk, Pare, Kediri, Tulungagung, Blitar, Tawing, dan Panggul. Masa berlakunya kontrak kerja tersebut 1892-1896.<sup>28</sup>

Setelah jaringan kereta api terhubung dengan Kediri dan Surabaya, maka jalan kereta api Blitar-Wlingi (19 Km) dibangun dan diresmikan pada 10 Januari 1896, dan Wlingi-Kepanjen (36 Km) diresmikan pada 30 Januari 1897.<sup>29</sup> Pembukaan jalur Blitar-Wlingi juga merupakan hasil dari desakan yang telah disampaikan oleh para pengusaha yang tergabung dalam *Blitarsche Landbouwvereniging* pada 10 Oktober 1889.<sup>30</sup> Dengan demikian, sejak itu pengangkutan produk perkebunan dengan kereta api dari Blitar ke Surabaya dapat juga melalui Kepanjen dan Malang. Pada 1900 hampir semua kota-kota di Jawa Timur sudah dihubungkan dengan baik oleh jalur kereta api<sup>31</sup> dan dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas Belanda di Blitar. Pengadaan kereta api pada dasarnya

untuk memenuhi kebutuhan pelayanan para pejabat Belanda dan pengusaha sebagai sarana mobilitas atau alat pengangkutan hasil produksi perkebunan dan industri mereka. Kereta api memainkan peranan penting dalam mengintegrasikan Jawa secara ekonomi dan sosial sejak abad ke-19,<sup>32</sup> dan sarana pendukung eksploitasi yang efektif terhadap daerah-daerah sumber kekayaan alam yang menguntungkan. Dengan tersedianya jaringan kereta api tersebut, wilayah Blitar dapat memiliki akses menuju pelabuhan atau pusat-pusat layanan ekspor.

Terdapat tiga hotel di *Gemeente* Blitar yang dikenal sebagai hotel berkelas untuk daerah itu, yakni Hotel Chemin de Fer, Hotel Van Rheeden, dan Hotel Centrum. Ketiganya berlokasi pada posisi yang strategis di pusat kota. Keberadaan ketiga hotel tersebut menunjukkan bahwa *Gemeente* Blitar menjadi salah satu daerah yang sering dikunjungi oleh orang-orang dari luar daerah (terutama orang Belanda) untuk berbagai kepentingan dan kegiatan.

Di wilayah *Gemeente* Blitar terdapat dua buah klinik yang menjadi pusat layanan kesehatan, yaitu sebuah klinik untuk masyarakat bumiputera, dan sebuah klinik untuk orang-orang dan pekerja Eropa,<sup>33</sup> yang berkembang menjadi rumah sakit. Keduanya sangat berbeda dalam tingkat ukuran dan layanannya. Rumah sakit untuk masyarakat bumiputera amat sederhana dan terbatas tenaga dan kelengkapan medisnya. Bangunan yang disediakan juga dalam ukuran kecil, sehingga juga sering disebut sebagai rumah sakit kecil. Sebaliknya, rumah sakit untuk orang-orang Eropa jauh lebih memadai, dengan tenaga dan peralatan medis yang lebih lengkap, sehingga juga lebih mahal, lebih dikenal sebagai rumah sakit besar. Orang-orang Eropa dan orang-orang kaya atau para pejabat tidak akan puas

jika memeriksakan kesehatan atau berobat di rumah sakit untuk masyarakat bumiputera. Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Asisten Residen Blitar, G.H. Barro, dalam memori serah jabatannya tertanggal 30 Agustus 1929.<sup>34</sup>

Disebutkan juga bahwa tingkat kesehatan masyarakat *Gemeente* Blitar cukup bagus jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain, seperti Tulungagung dan Trenggalek. Penyakit cacar banyak melanda Jawa Timur, khususnya Surabaya, dan daerah Blitar relatif bebas dari penyakit tersebut.<sup>35</sup> Kematian berkisar antara 12/1000 dan 16/1000. Penyakit yang banyak ditemui adalah gondok. Oleh karena itu atas persetujuan dokter Pemerintah Daerah akan disediakan tempat penjualan garam beryodium untuk mencegah menjalarnya penyakit gondok. Selain dokter orang Belanda di Kota Blitar juga ditempatkan dokter bumiputera dan diberi tugas untuk mengurus Dinas Kesehatan Umum. Poliklinik juga didirikan di beberapa tempat seperti Lodoyo, Srengat, Gandusari, dan Kesamben, yang dalam pelaksanaan sehari-harinya ditangani oleh seorang mantri dari Departemen Kesehatan.<sup>36</sup> Sebuah apotek yang ada di *Gemeente* Blitar bernama De Bromo.

Sampai 1923 listrik masih amat minim di Blitar, ditandai dengan jalan-jalan utama yang dirasa kekurangan penerangan. Pemerintah *gemeente* menunjuk De Blitarsche Blik-en Zinkindustrie untuk menyediakan dan mengoperasikan semua perangkat yang diperlukan untuk penerangan jalan.<sup>37</sup> Pemerintah *gemeente* berusaha meningkatkan penyediaan tenaga listrik pada 1927 dengan menyiapkan pusat listrik tenaga diesel.<sup>38</sup> Sarana pendukung program tersebut segera disediakan dan direncanakan akan dapat beroperasi pada April 1928.<sup>39</sup> Pada 1929 di sentral listrik

Blitar telah dipasang motor diesel tambahan dengan kekuatan 250 PK.<sup>40</sup> Sumber listrik tersebut akan dapat mendukung meningkatnya aktivitas pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga lainnya. Klinik dan rumah sakit, kantor pemerintah, jalan raya, rumah kediaman atau rumah tangga (terutama orang-orang Belanda dan kalangan masyarakat kelas atas) dan perusahaan, memerlukan tenaga listrik lebih besar untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari.<sup>41</sup> Setelah *Gemeente* Kediri dipasang listrik pada 1924,<sup>42</sup> Blitar dipasang pada 1933 oleh NIWEM (Nederlandsch Indie Waterkracht en Elektriciteit Maatschappij) dengan sebuah gardu listrik.<sup>43</sup> Sejak itu Blitar memiliki jaringan listrik yang lebih memadai.

Air bersih menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat kota. *Bugemeester* Blitar, J.H. Boerstra, dalam catatannya menyebutkan bahwa air minum diusahakan oleh pemerintah dan disalurkan ke beberapa kompleks perumahan yang dihuni oleh orang-orang Eropa.<sup>44</sup> Untuk memenuhi keperluan tersebut air diambilkan dari sumber air di daerah perkebunan Buluroto, yang berjarak kira-kira 15 Km di sebelah Timur Laut *Gemeente* Blitar. Adanya kebutuhan air dalam volume yang besar, maupun kualitas tertentu yang sesuai kebutuhan, maka diusahakan dengan menggunakan pompa untuk menaikkan air. Sebuah pompa air besar dibangun oleh pemerintah dan Perusahaan Kereta Api di Kampung Dongki.<sup>45</sup>

Pemerintah *Gemeente* Blitar pada 28 Agustus 1923 menetapkan N.V. Bataafsche Petroleum Maatschappij sebagai pihak yang disetujui untuk menyediakan dan mengatur penyediaan bahan bakar minyak di Blitar dan sekitarnya.<sup>46</sup> Hal itu penting untuk menjaga ketersediaan BBM bagi

masyarakat dan dunia usaha, serta menghindari resiko kecelakaan karena penyimpanan dan penimbunan BBM memerlukan penanganan khusus.

Tidak ada perusahaan jasa konstruksi yang berkedudukan di Blitar. Bagian pembahasan ini menyangkut beberapa bangunan bidang konstruksi yang secara jelas berpengaruh terhadap perkembangan struktur dan pembentukan tatakota. Bekas-bekas bangunan irigasi tetap dimanfaatkan sebagaimana fungsinya, seperti berikut ini.<sup>47</sup>

1. Aliran Sungai Kembangan-Tanjungsari-Pakunden.
2. Aliran Sungai Tanggung-Bendo-Dawuhan-Dimoro.
3. Aliran Sungai Jatimalang-Dam Sentul-Cari-Plered-Meduran-Mentaraman ditunjang dari Sumberbentis ke Karang Sari-Tlumpu-Rembang.
4. Aliran Sungai Jatimalang ditunjang dari sumber Jurangsembot dan Sendang menjadi Sungai Urung-urung.
5. Aliran Sungai Gedog yang terdiri dari : Aliran Sungai Gedog I-Plered-Gebang-Karanglo; Aliran Sungai Gedog II-Brendil-Sananwetan-Karanglo menyatu dengan Sungai Gedog I ke Karangtengah-Klampok; Aliran Sungai Gedog III-Ngegong-Ngrebo-Sananwetan/Kuningan. Sungai Gedog aslinya mengalir langsung ke arah selatan ke sebelah barat Jl. Enggano, kemudian dialihkan alirannya ke arah barat menjadi saluran Gebang, berdampingan dengan Jl. Ahmad Yani memisahkan Gebang Lor dan Gebang Kidul, dipertemukan kembali dengan aslinya di sebelah selatan rel kereta api, di Jl. KS. Tubun menuju Karanglo.

Perumahan yang dibangun oleh pemerintah *gemeente* berada di

Bendogerit, menghadap De Garoemstraat. Kompleks ini menjadi bagian penting dalam tataruang yang direncanakan oleh pemerintah, sebab ternyata di Bendogerit pula terkonsentrasi sebagian besar aktivitas penting orang-orang Belanda. Selain dibangun sebagai kompleks pemukiman yang ideal, juga dibangun kompleks pendidikan (dengan didirikannya ELS, HIS, MULO), kompleks susteran, kompleks paroki (lengkap dengan asrama dan gereja), taman kota (Kebon Raja), sarana olahraga, dan rumah dinas pejabat pemerintah, dan OSVIA. Keseluruhan kompleks ini diproyeksikan oleh pemerintah *gemeente* sebagai model pengembangan tatakota Blitar yang modern tetapi tetap mempertahankan ciri dan suasana pedesaan yang nyaman.<sup>48</sup> Pemerintah membangun 22 rumah murah dengan harga sewa berkisar antara f. 7,50 sampai f. 25, - perbulan.<sup>49</sup> Akan tetapi kebutuhan rumah yang lebih sederhana lebih banyak jumlahnya, yakni untuk menampung masyarakat yang kurang mampu. Pengadaan perumahan itu penting agar tidak terjadi penumpukan penduduk di lokasi yang kumuh yang dapat mengganggu kebersihan, keamanan dan ketertiban kota, serta disesuaikan dengan program perbaikan kampung. Oleh sebab itu dibangunlah pemukiman dengan harga sewa antara f. 4,- sampai f. 6,- perbulan, tetapi tetap dengan memperhatikan penataan jalan dan selokan drainase, penyediaan air bersih, dan penanaman pohon dan terus mengembangkan kawasan kota yang lebih nyaman, sehat, dan indah.<sup>50</sup> Munculnya kapling-kapling pondokan di kampung-kampung kota, seringkali rawan kebakaran, sanitasi yang buruk, sarang penyakit, kekurangan air bersih, pencemaran, lingkungan kumuh, serta tiadanya area rekreasi.<sup>51</sup> Tempat-tempat strategis dan potensial di Kota Blitar,

yang biasanya menjadi tempat bertemu dan berkumpulnya banyak orang, menjadi salah satu sasaran para pendatang untuk membangun pemukiman baru mereka. Sekitar stasiun kereta api (Kepanjenkidul) dan pasar (Pasar Legi dan Pasar Baru),<sup>52</sup> misalnya, menjelma menjadi kampung-kampung yang semakin padat penghuninya, baik para pedagang, pekerja (kuli), maupun buruh. Kawasan seperti ini harus selalu diperhatikan agar tidak semakin luas. Kondisi ini mendorong dilaksanakan program *kampongsverbetering* di setiap kota, tidak hanya terbatas pada kota-kota besar.<sup>53</sup> Bangunan-bangunan lain berupa Stadshuis, tempat ibadah (masjid, kelenteng, dan gereja), taman kota, pemakaman bagi warga Eropa dan Cina, pemandian umum, lapangan olahraga, pasar, dan sebagainya.

Industri pengolahan dalam skala besar terdapat di wilayah kabupaten. Di *Gemeente* Blitar terdapat dua pabrik minyak, yaitu di Pakunden dan Oliefabrieken van Dongen (Olvado) di Sukorejo.<sup>54</sup> Selain itu semula masyarakat mengusahakan industri rumah tangga pembuatan rokok kretek. Usaha tersebut semakin terdesak oleh para pengusaha Cina yang memproduksinya dengan sistem pabrik. Akibatnya usaha rumah tangga itu kemudian beralih menjadi bekerja untuk pengusaha Cina, sehingga pada 1927 dan 1928 Asisten Residen G.H. Barro mencatat mereka dapat memperoleh keuntungan puluhan ribu gulden.<sup>55</sup> Blitar dikenal sebagai daerah produsen rokok yang diusahakan oleh (terutama) orang-orang Cina antara lain dengan cap Mentjo, dan Tjikrak-Tladung. Keberhasilan tersebut mendorong munculnya beberapa perusahaan rokok baru, baik di Kota Blitar maupun di luar kota. Perusahaan-perusahaan yang lebih belakangan muncul memproduksi rokok

cap Umpling, Bumbang, Saringan, Boket, Orong-orong, dan Baji Sutji.<sup>56</sup>

### C. Kendala Industrialisasi

Faktor alam dan finansial berpengaruh besar terhadap industrialisasi di Blitar. Kalangan masyarakat Blitar dan sekitarnya sangat mengenal *unen-unen* yang menyebutkan *Blitar dadi latar, Kediri dadi kali, Tulungagung dadi kedhung*. *Unen-unen* itu sangat terkait dengan keberadaan dan aktivitas Gunung Kelut yang terletak di sebelah utara Blitar, di daerah perbatasan dengan Kabupaten Kediri. Ketiga daerah kabupaten tersebut yang paling merasakan dampaknya karena selalu menjadi sasaran limpahan material vulkanik. Letusan pada 1919 terjadi pada tengah malam antara 19 dan 20 Mei. Sebaran abu vulkanik ke arah barat mencapai Bandung dan ke arah timur mencapai ujung timur Bali.<sup>57</sup> Letusan itu merupakan peristiwa dahsyat dengan suara dentuman serta gemuruh amat keras dan terdengar sampai di daerah Kalimantan. Cuaca menjadi gelap karena abu menutupi hampir seluruh wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, sehingga suasana pada siang hari seperti menjelang malam. Bencana ini mengakibatkan 5.160 orang meninggal dan kerusakan hebat, terutama Kabupaten Blitar dan Kediri. Banjir lahar menyebabkan lebih 15.000 hektar tegalan, lahan pertanian dan perkebunan rusak berat, serta ratusan desa dan kampung hampir rata dengan tanah.<sup>58</sup> Jebolnya tanggul Sungai Badak menyebabkan *Gemeente* Blitar dilanda lahar hebat. Banyak material vulkanik berupa pasir, batu dan lumpur, kayu, kotoran, bangkai binatang dan mayat manusia, pohon-pohon tumbang menimbun sebagian besar kota.

Dam Bladak [*sic.*] terletak di Kali lahar, berfungsi sebagai tanggul pengaman jika terjadi luapan lahar. Kali

lahar adalah salah satu aliran utama yang menampung muntahan lahar dari puncak Gunung Kelut. Dam ini mula-mula tingginya 10 meter, dan terbukti tidak efektif ketika terjadi erupsi pada 1919, sehingga kemudian ditinggikan lagi untuk mencegah bahaya yang mengancam dan menuju ke *Gemeente* Blitar.<sup>59</sup> Letusan hebat pada Mei 1919 ini selanjutnya mendasari lembaga Survai Vulkanologi memutuskan tugas yang pertama yang harus mereka lakukan adalah untuk mengalirkan air danau kawah melalui suatu terowongan buatan. Pekerjaan tersebut dimulai pada September 1919 dan memerlukan waktu beberapa tahun untuk dapat menyelesaikannya. Bemmelen (1949) menjelaskan, rencana awalnya adalah menggali suatu terowongan sepanjang 955 meter. Ketika pekerjaan dimulai, kawah masih kering dan penggalian terowongan dimulai dari kedua sisi dinding kawah. Oleh karena temperatur yang tinggi di area kerja penggalian (46°C), sehingga terowongan itu sampai 1923 belum dapat diselesaikan. Pada waktu itu kawah telah terisi air hingga separuh (kira-kira mencapai 22 juta meter kubik air). Banjir lumpur dan kerikil yang tidak terduga terjadi dan memenuhi terowongan yang tengah digali. Peristiwa tersebut menewaskan lima orang pekerja, sehingga pekerjaan dihentikan pada 1923. Rencana baru diputuskan untuk menurunkan level air kawah secara progresif dengan pemboran tujuh terowongan paralel besar dan menggunakan pipa sifon untuk mengalirkan air kawah. Pekerjaan ini berhasil diselesaikan pada 1926 dan sukses menurunkan volume kawah sampai kurang dari dua juta meter kubik. Pekerjaan besar tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kolonial, sebab dampak erupsi Kelut selalu menimbulkan kerugian besar. Menurut Bemmelen, Gunung Kelut merupakan

contoh pertama dan paling ambisius dari suatu pekerjaan rancang-bangun yang dibuat di suatu gunung api untuk mengurangi ancaman yang berasal dari danau atau kawah.<sup>60</sup> Pembangunan dan pekerjaan konstruksi setelah 1919 banyak berkaitan dengan rehabilitasi akibat erupsi itu, contohnya memperbaiki dan memindah jembatan dan jalan, meninggikan rel kereta api, memperbaiki gedung, dan sebagainya.

Kendala lainnya adalah terbatasnya dana pemerintah dan tidak tersedianya lahan luas yang relevan untuk usaha industri. Pada 1906 hingga 1914 pemerintah *gemeente* hanya memiliki anggaran sejumlah f. 11.850,- Pada 1925-1928 sebesar f. 24.340,- Pada 1939 menjadi f. 32.414,- pada 1940 menjadi f. 39.076,- dan pada 1942 turun menjadi f. 31.122,-<sup>61</sup>

#### D. Dampak Industrialisasi

Industrialisasi di *Gemeente* Blitar berdampak terhadap daerah, pemerintah daerah, dan sosial ekonomi masyarakat. Hal itu antara lain dapat dilihat dalam beberapa aspek sebagai berikut.

1. Blitar menjadi daerah yang terbuka, hubungan dan komunikasi dengan daerah lain dan luar negeri dapat terjalin dengan mudah dan lancar karena telah dibangun jasa komunikasi dan transportasi. Jalan dan jalan kereta api membuat lalu lintas orang dan barang terus meningkat.
2. Segregasi sosial yaitu pengucilan atau pemisahan kelompok masyarakat tertentu dalam kehidupan sosial sehari-hari. Pengucilan tersebut dapat berupa pembatasan. Hal itu dapat dilihat dari dibangunnya perumahan untuk masyarakat warga Eropa di Bendogerit. Penyelenggaraan pendidikan, dalam praktiknya juga terjadi pembedaan persyaratan untuk

dapat diterima sebagai siswa di sekolah.

3. Konflik industrial. Konflik ini mencul ketika diselenggarakan Rapat Peresmian SI Blitar pada 1914. Pada saat SI menuntut penyesuaian harga sewa lahan penanaman tebu dan pemberian aliran irigasi yang memadai. Usulan dan aspirasi SI Blitar itu juga mendapat dukungan dari Pekalongan, dan menjadi salah satu bahasan utama dalam Kongres Nasional SI Pertama di Bandung 1916.<sup>62</sup> SI Blitar menjadi salah satu penggerak penuntutan tersebut tetapi tidak sampai menimbulkan konflik terbuka.
4. Tata ruang baru dan *kampongsverbetering*. Perkembangan industri menyebabkan pemerintah harus mengatur penggunaan lahan, keamanan dan ketertiban di lingkungan kota. Oleh sebab itu tata ruang di kota diatur sedemikian rupa, sehingga menjamin keamanan, kenyamanan, dan kelangsungan industri, sebab industrialisasi yang identik dengan modernisasi juga memiliki dampak spasial atas wilayah kota.<sup>63</sup> Industrialisasi berpengaruh terhadap kondisi fisik kota, termasuk pencemaran lingkungan, dan sebagainya.<sup>64</sup> Pembangunan jalan dan gedung-gedung menciptakan wajah kota yang semakin rapi dan indah, menjadi tersedia kawasan pusat pemerintahan, daerah pemukiman, pusat aktivitas ekonomi, tempat-tempat aktivitas pendidikan, keagamaan, olahraga dan hiburan (rekreasi). Keteraturan dan ketertiban itu harus dihindarkan dari kesan kumuh, dan kotor. Program *kampongsverbetering* dijalankan untuk menghindari hal tersebut, terutama untuk menjaga kebersihan, kesehatan dan kenyamanan seluruh warga kota. Pelaksanaan program itu

berdasarkan kebijakan dan petunjuk teknis dari Desentralisatie Kantoor.<sup>65</sup>

5. Sosial ekonomi. Berdirinya beberapa industri menarik para pendatang dari luar kota untuk bekerja dan menetap di kota. Pada 1920 jumlah penduduk kota 19.700 orang (termasuk 500 orang warga Eropa dan 1.700 orang Cina),<sup>66</sup> pada 1930 berubah menjadi 27.846 orang (termasuk 673 warga Eropa, 24.372 bumiputera, 2.746 Cina dan 55 warga Timur Asing).<sup>67</sup> Peningkatan jumlah yang cukup besar adalah warga Cina, yaitu mencapai hampir 67%, sedang warga Eropa meningkat 33,6%.<sup>68</sup> Dengan demikian kepadatan penduduk Kota Blitar (luas wilayah 6,4 Km<sup>2</sup>) mencapai 4.351,6 orang per Km<sup>2</sup>.<sup>69</sup> Angka kematian tercatat 18,4 (1929), 17,9 (1930), dan 18,6 (1931).<sup>70</sup> Aspek ekonomi merupakan aspek yang menonjol dalam kehidupan masyarakat kota. Keragaman, tingkat perkembangan, dan dinamika berbagai aspek perekonomian masyarakat kota merupakan faktor dominan yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan kota. Pasar, pertokoan, sarana dan prasarana produksi dan distribusi yang lebih lengkap dan memadai, menyebabkan kota mampu berkembang lebih baik dari pada daerah lainnya.<sup>71</sup> Pembangunan Pasar Legi pada 1910-an menunjukkan makin berkembangnya perekonomian kota. Pembangunan pasar ini dimaksudkan untuk menampung para pedagang lokal dan luar daerah, dan menjadi salah satu pusat aktivitas perekonomian. Jalan menuju lokasi tersebut diperlebar dan diperbaiki sehingga menjadi De Passarstraat pada 1923. Di sekitar pasar muncul rumah dan pertokoan Cina, bahkan rumah Capiten der Chineezen. Kompleks tersebut menjadi lokasi

pemukiman etnis Cina lengkap dengan kelenteng yang berada di sudut timur laut Pasar Legi. Selanjutnya, banyak toko Cina didirikan di pusat kota, terutama di sepanjang De Heerenstraat, De Stationstraat dan beberapa jalan kota di sekitarnya. Para pedagang bumiputera berjualan di dalam dan pinggiran pasar, dan sebagian mendirikan kios-kios sederhana yang terbuat dari bahan bambu dan kayu. Sebagian di antara mereka bahkan menggelar dagangan di tepian jalan menuju pasar.

6. Dibentuknya lembaga baru dan Peraturan Daerah baru. Pengamanan ladang tebu dan pabrik-pabrik gula menjadi perhatian serius para pengusaha, karena sering terjadi kasus perusakan, pembakaran ladang dan pencurian. Sekitar 1900-an kebakaran ladang tebu terbesar terjadi di wilayah Besuki, Pasuruan (pada 1902 daerah Probolinggo termasuk wilayah Keresidenan Pasuruan) dan Kediri, baik diukur dari segi jumlah pembakaran maupun luas lahan yang dibakar. Luas ladang tebu pada 1903: Besuki 8.462 bau,<sup>72</sup> Pasuruan 19.501 bau, dan Kediri 17.018 bau, dan jumlah pabrik: Besuki 10, Pasuruan 27, dan Kediri 16. Panen tebu diukur dengan pikul tebu.<sup>73</sup> Menurut Dickooff ketiga daerah tersebut merupakan wilayah penghasil gula terpenting di Hindia Belanda.<sup>74</sup> Elson dan van Moll mencatat bahwa pada 1903, pengusaha pabrik mencatat 720 (Besuki), 370 (Pasuruan), dan 438 (Kediri) kebakaran, menghancurkan 810 bau (Besuki), 388,5 bau (Pasuruan), dan 1.450 bau (Kediri) ladang tebu.<sup>75</sup> Para pemilik pabrik di riga keresidenan itulah yang pertama kali membentuk polisi perkebunan. Blitar mempunyai peran dan sumbangan penting dalam

pembentukan polisi perkebunan. Pabrik-pabrik gula di Kediri pada 1903 turut memberlakukan sistem tersebut di *afdeeling* Kediri dan pada 1906 diperluas mencakup di *afdeeling* Blitar, Berbek, dan Tulungagung.

Peraturan daerah yang dibuat dan ditetapkan berkaitan dengan perkembangan industri antara lain mengenai minuman keras. Peredaran minuman keras harus diatur sebab dapat menimbulkan dampak negatif. Peraturan Daerah ini dapat diketahui keberadaannya karena adanya permohonan pemilik Hotel Van Rheedeen untuk meringankan tunggakan pajak minuman keras yang ditanggungnya pada 1921 sampai 1923.<sup>76</sup>

#### IV. SIMPULAN

Pembangunan sektor industri di *Gemeente* Blitar menunjukkan dinamika historis menarik dan kompleks, juga sisi positif dan sisi negatif bagi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai simpulan adalah sebagai berikut.

1. Industrialisasi diawali dengan pembukaan perkebunan dengan memperkenalkan pola tanam baru, berorientasi ekspor, memiliki semangat kemandirian, dan memicu pengembangan industri lainnya.
2. Sektor industri dipacu karena mampu memberikan keuntungan lebih besar dan menjadi sarana eksploitasi yang efektif dan optimal, tetapi mengingkari tujuan semula, sebab tidak sepenuhnya berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Industri harus memiliki ijin, tetapi dalam situasi tertentu syarat harus ada ijin akan membelenggu atau membatasi pengusaha untuk mengembangkan perusahaan dengan upaya dan kreasi yang lebih menguntungkan dalam singkat atau mendesak.

4. *Gemeente* Blitar berperan sebagai pusat pengendalian perusahaan perkebunan dan kelancaran hubungan dan distribusi produk perkebunan.
5. Industri rumah tangga semakin terdesak akibat kemunculan industri pabrik dan pemilik modal yang lebih kuat.
6. Berkembangnya industrialisasi di kota menimbulkan dampak dalam kehidupan masyarakat, maupun terhadap bentuk fisik kota, meliputi : (a) terbukanya isolasi daerah, (b) segregasi sosial, (c) konflik industrial, (d) struktur baru Kota Blitar dan *Kampongsverbetering*, (e) dampak sosial ekonomi, (f) pembentukan lembaga baru dan pembuatan Peraturan Daerah.
7. Ditinjau dari aspek tataruang kota, dapat dikatakan bahwa perencanaan dan pengembangan tataruang Kota Blitar dalam batas tertentu gagal. Lingkungan perkotaan yang diidealkan dan dicontohkan dalam penataan kawasan Bendogerit tidak dapat diterapkan di desa-desa lainnya, karena terbatasnya lahan dan dana yang dimiliki oleh pemerintah. Program *kamposngsverbetering* tidak dapat diterapkan di semua desa. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan oleh (a) sering terjadi bencana alam, (b) tidak ada perusahaan konstruksi dan *utility* yang berpusat di Blitar, (c) Pemerintah Kolonial Belanda setengah hati dalam menetapkan pengembangan Kota Blitar, (d) perusahaan besar yang membawahi perusahaan-perusahaan di Blitar umumnya berpusat di Malang, Surabaya, dan bahkan Batavia, akibatnya efektivitas dan intensitas pengawasan menjadi kurang.
8. Ada kendala yang tidak dapat diatasi secara cepat, pembangunan industri tidak semuanya berhasil seperti yang

diharapkan. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah *Gemeente* Blitar dan pemilik modal adalah terbatasnya lahan yang relevan, dan terbatasnya dana yang dimiliki oleh pemerintah.

## CATATAN

---

<sup>1</sup> W.F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition: a Study of Social Change* (The Hague: Van Hoeve, 1959), hlm. 57, atau dalam edisi terjemahan bahasa Indonesia *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi, Studi Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 44-45.

<sup>2</sup> Periksa *25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch Indië 1905-1930 Uitgegeven voor de Vereeniging voor Locale Belangen* (Semarang: Samensteller FWM Kerchman, 1930), hlm. 369.

<sup>3</sup> Abdurrachman Surjomihardjo, *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe, Sejarah Sosial 1880-1930* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 1.

<sup>4</sup> W.F. Wertheim, *op.cit.*, hlm. 152-153.

<sup>5</sup> Periksa Bisuk Siahaan, *Industrialisasi di Indonesia Sejak Hutang Kehormatan Sampai Banting Stir* (Bandung: Penerbit ITB, 2000) dan D.H. Burger, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia II* (Djakarta: Pradnja Paramita, 1970).

<sup>6</sup> D.H. Burger, *ibid.*, hlm. 190.

<sup>7</sup> *Ensiklopedi Indonesia 3* (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1982), hlm. 1442-1443.

<sup>8</sup> Colin Barlow dan John Drabble, "Pemerintah dan Industri Karet yang Muncul di Indonesia dan Malaysia, 1900-1940" dalam Anne Booth, William J.O. Malley, Anna Weidemann (Penyunting), *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta LP3ES, 1988), hlm. 258-289.

<sup>9</sup> Dewi Yuliati, *Menuju Kota Industri, Semarang Pada Era Kolonial* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Press, 2009), hlm. 65-81.

<sup>10</sup> Bisuk Siahaan, *op.cit.*, hlm. 34-35.

<sup>11</sup> Batas dan letak koordinat itu yang berlaku sekarang (2012), setelah terjadi pemekaran wilayah (sejak tahun 1981 dan 2005) dan berbeda dengan ketika masih berupa *Gemeente* Blitar. *Kota Blitar Dalam Angka 2010* (Blitar: BPS dab Bappeda Kota Blitar,

2010), hlm. 3 dan 7. Sumber lain menyebutkan tinggi rata-rata 170 M, periksa T.J. Bezemer (*et.al. redacteurs*), *Oosthoek's Geillustreerde Encyclopaedie Tweede Druk Deel II* (Utrecht: A. Oosthoek, 1925), hlm. 701.

<sup>12</sup> *Notulen der openbare vergadering van Gemeenteraad van Blitar* 14 Januari 1921 dan *Notulen der openbare vergadering van Gemeenteraad van Blitar* 9 November 1923 punt 7.

<sup>13</sup> Disarikan dari bagian-bagian dalam Tim Penyusun, *Hari Jadi dan Bunga Rampai Sejarah Kota Blitar* (Blitar: Kantor Bappeda Pemkot Blitar, 2010). Periksa *Koloniaal Verslag van 1915* (Gedrug ter Algemeene Landsdrukkerij), hlm. 119, *Koloniaal Verslag van 1917* (Gedrug ter Algemeene Landsdrukkerij), hlm. 120. John Tondowidjojo, *Ricordare "Yohanes Gabriel" Indonesia* (Surabaya: Yayasan Sanggar Bina Tama, 2006). Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2007).

<sup>14</sup> Sartono Kartodirdjo, dkk (Dewan Redaksi), *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Timur dan Tanah Kerajaan)* (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1978), hlm. CXCIX.

<sup>15</sup> *Staatsspoor-en Tramwegen in Nederlandsch-Indië, Jaarstatistieken over het Jaar 1927* (Weltevreden: Landsdrukkerij, 1929), hlm. 229.

<sup>16</sup> S. A. Reitsma, *Dients der Staasspoor- en Tramwegen, Mededeelingen Administratieve Diensts No. 1 Indische Spoorweg Politiek Deel IV* (Weltevreden: Albrecht & Co., 1920), hlm. 24.

<sup>17</sup> BrinKman's, *Cultuur-Adresboek voor Nederlandsch-Indië 1939* (Soerabaja: Reis & Co.), hlm. 1-11.

<sup>18</sup> Harimintadji, *Menguak Tabir Boyongan Ibukota Kabupaten dari Berbek ke Nganjuk* (Nganjuk: Pemda Kabupaten Nganjuk 2002), hlm. 24.

<sup>19</sup> Tim Penyusun, *Hari Jadi dan Bunga Rampai Sejarah Kota Blitar*, hlm. 87.

<sup>20</sup> *Verslag Omtrent den Dienst der Postpaarbank in Nederlandsch-Indië over het jaar 1928* (Welevreden: Landsdrukkerij, 1929), hlm. 56-57.

<sup>21</sup> *Regeerings Almanak Voor Nederlandsch-Indië 1895 Eerste Gedeelte* (Batavia-Landsdrukkerij), hlm. 291-292.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 293.

<sup>23</sup> Online

<http://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi> diunduh pada Selasa, 09-08-2011, pk. 09.15.

<sup>24</sup> Data maupun dokumentasi tercetak yang menyebutkan mengenai masuknya jaringan telepon ke Blitar belum ditemukan.

<sup>25</sup> Dewi Yulianti, *op.cit.*, hlm. 70. Iklan dalam media pers adalah sarana yang praktis, efektif, dan amat membantu promosi produk suatu perusahaan. Pers dapat memiliki jangkauan yang lebih luas, serta penyebarannya dalam tempo yang lebih singkat. Masyarakat akan dapat memperoleh informasi suatu produk industri dengan membaca iklan, dan perusahaan tidak terlalu repot untuk melakukan promosi langsung kepada masyarakat.

<sup>26</sup> Koleksi *Tjondo Berowo* yang tersimpan di Perpustakaan Nasional (Jakarta) hanya sampai pada penerbitan tahun 1926 (bentuk asli dan mikro film). Penerbitan tahun-tahun sesudah tahun 1926 itu tidak ditemukan, sehingga tidak diketahui masih terbit atau tidak terbit lagi. Menilik iklan yang dimuat di dalamnya, majalah tersebut memiliki pangsa pasar cukup luas, tetapi tidak ditemukan data mengenai hal tersebut. Demikian juga data mengenai seberapa banyak tiras penerbitan dan distribusinya. Sumber iklan menunjukkan berasal dari daerah Kalimantan, Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali, bahkan juga amngiklankan produk luar negeri (dari Malaysia).

<sup>27</sup> Kartawibawa, *Bakda Mawi Rampog, Wedalan Bale Poestaka* (Weltevreden: Drukkerij Volkslectuur, 1923), hlm. 13-14. Periksa Rudolf Mrazek, *Engineers of Happy Land, Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di sebuah Koloni*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 25.

<sup>28</sup> *Regeerings Almanak 1895 Tweede Gedeelte*, hlm. 526.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>31</sup> Handinoto, "Perletakan Stasiun Kereta Api Dalam Tata Ruang Kota-Kota di Jawa Khususnya Jawa Timur Pada Masa

Kolonial" dalam *Dimensi* Vol. 27 No. 2, Desember 1999 (Surabaya: Teknik Arsitektur Universitas Kristen Petra Surabaya), hlm. 48-56.

<sup>32</sup> Robert Crib, *Historical Atlas of Indonesia* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2000), hlm. 140.

<sup>33</sup> Klinik untuk masyarakat bumiputera sekarang menjadi SLB Blitar (Gedung Panti Karya) dan klinik untuk orang-orang Belanda sekarang menjadi RS Budi Rahayu Blitar, keduanya berada di Jl. Ahmad Yani. Belum diketahui secara jelas mana yang berdiri terlebih dahulu.

<sup>34</sup> Sartono Kartodirdjo, dkk (Dewan Redaksi), *op.cit.*, hlm. CXCVI.

<sup>35</sup> *Sri Djojo Bojo*, Lembar Kedua, 29 Mei 1925.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Notulen der openbare vergadering van Gemeenteraad van Blitar* 28 Augst 1923, punt 6.

<sup>38</sup> N.V. Algemeene Nederlandsch-Indische Electriciteit Maatschappij, gevestigd te Amsterdam. *Verslag over het 20ste Boekjaar (1927)*, hlm. 9.

<sup>39</sup> N.V. Algemeene Nederlandsch-Indische Electriciteit Maatschappij, gevestigd te Amsterdam. *Verslag over het 20ste Boekjaar (1928)*, hlm. 8.

<sup>40</sup> Algemeene Nederlandsch-Indische Electriciteit Maatschappij, N.V., gevestigd te Amsterdam. *Verslag over het 21ste Boekjaar (1929)*, hlm. 8.

<sup>41</sup> Sampai saat ini belum ditemukan data dan informasi mengenai lokasi keberadaan sentral listrik tenaga diesel Blitar tersebut.

<sup>42</sup> *Sri Djojo Bojo*, 26 Januari 1924, hlm. 3.

<sup>43</sup> Gardu induk listrik tersebut berada di Desa (sekarang kelurahan) Sentul dan dimanfaatkan untuk pengendalian dan distribusi listrik untuk kawasan Blitar. Gedung tersebut saat ini berada di sebelah selatan Makam Bung Karno dan dibiarkan mangkrak. Setelah gardu induk itu berfungsi, belum diketahui kelanjutan pusat listrik tenaga diesel yang sebelumnya sudah ada.

<sup>44</sup> *25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch Indië 1905-1930 Uitgegeven voor de Vereeniging voor Locale Belangen*, hlm. 373. Tidak ada penjelasan mengenai

pipanisasi maupun tempat-tempat penampungan dan distribusinya. Bangunan-bangunan yang berkaitan dengan penyediaan air minum dari sumber air Buluroto juga sudah tidak ditemukan.

<sup>45</sup> Dongki diperkirakan berasal dari kata *dokkeren kracht* (kekuatan yang mengetuk atau memukul berkali-kali), yakni sebuah gerakan akibat tekanan air yang memukul sendiri terus-menerus dan menggerakkan kelep pompa, sehingga memompa sendiri. Gerakan tersebut dapat memompa air naik ke permukaan yang lebih tinggi, seperti dikenal sekarang dengan nama pompa hidram. Saat ini pompa air tersebut sudah tidak ada, bahkan bekas bangunannya juga sudah tidak ditemukan lagi fondasinya.

<sup>46</sup> *Notulen der openbare vergadering van Gemeenteraad van Blitar 28 Augst 1923*, hlm. 13. Tidak disebutkan pusat kedudukan perusahaan tersebut (kira-kira di Batavia) dan Blitar menjadi salah satu cabangnya.

<sup>47</sup> Tim Penyusun, *Hari Jadi dan Bunga Rampai Sejarah Kota Blitar*, hlm. 108-109.

<sup>48</sup> *25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch Indië 1905-1930 Uitgegeven voor de Vereeniging voor Locale Belangen*, hlm. 369.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 373.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 373-374. Kompleks tersebut berada di sepanjang De Gebangstraat.

<sup>51</sup> Periksa W.F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi, Studi Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 140-141.

<sup>52</sup> Pasar Baru semula berada di dekat perempatan sebelah utara Gedung Pengadilan (sekarang Gedung Pemuda), kemudian dipindahkan ke Kepanjenlor dan diberi nama Pasar Pon.

<sup>53</sup> Th. W. van Kempen, "Over het Kampongvraagstuk in de Groote Indische Stadsgemeente" dalam *Koloniaal Tijdschrift, Uitgegeven door de Vereeniging van Ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur in Nederlandsch-Indië*, 1927 Zestiende Jaargang, hlm. 441.

<sup>54</sup> Howard W. Dick, *Surabaya, City of Work, A Socioeconomic History, 1900-2000* (Singapore: Singapore University Press, 2003), hlm. 271.

<sup>55</sup> Sartono Kartodirdjo, dkk (Dewan Redaksi), *op.cit.*, hlm. CXCVII. Tempat-tempat dan bangunan bekas pabrik rokok masa kolonial di Blitar tidak ditemukan lagi.

<sup>56</sup> Tim Penyusun, *Bunga Rampai dan Sejarah Kota Blitar*, hlm. 104-105. Setelah merdeka makin banyak perusahaan rokok yang didirikan di Blitar (antara lain Bokor Mas, Petjoet, Tonggeng, dan Suket Teki), dan sebagian merupakan cabang dari perusahaan rokok di Malang (cap Grendel, Oepet dan Bentoel), Tulungagung (cap Kerbau dan Retjo Pentung), dan Kediri (cap Gudang Garam).

<sup>57</sup> Data tersebut bersumber dari uraian Kemmerling (1921), dalam "Sejarah Letusan Gunung Kelut" dalam <http://blitarian.com> diunduh pada 8 Februari 2010.

<sup>58</sup> "Sejarah Letusan Gunung Kelut" dalam <http://blitarian.com>. Periksa *Buletin Berkala Vulkanologi*, Direktorat Vulkanologi, 1985 dan *Jurnal Geologi Indonesia*, Vol. 1 No. 4 Desember 2006. Kehebatan bencana Gunung Kelut tahun 1919 juga digambarkan oleh Bung Karno dalam otobiografinya dan menyebutkannya bahwa separoh negeri terlanda dampak letusan tersebut. Lihat Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, cetakan keempat (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1986), hlm. 51-53.

<sup>59</sup> Setelah terjadi letusan Gunung Kelut 1951 tingginya ditambah 1,5 M lagi. Pada 1952 dinaikkan lagi sampai dua kali, masing-masing 1,3 M dan 4,2 M. Tinggi dam itu menjadi 18 M sebelum terjadi letusan tahun 1966. Akan tetapi sejak letusan 1951, Kali Lahar tidak mengalami perubahan aliran, sedang setelah letusan 1953 lahar yang sudah dingin berangsur-angsur mulai turun ke sungai tersebut sehingga dasar sungai menjadi sangat dangkal. Lihat Dyah Trisnowati, dkk. *Bencana Alam di Jawa Timur 1890-1977* (Surabaya: Badan Arsip Propinsi Jawa Timur, 2005), hlm. 151-152.

<sup>60</sup> "Sejarah Letusan Gunung Kelut" dalam <http://blitarian.com> diunduh pada 8 Februari 2010. Beberapa catatan Belanda berupa lembaran-lembaran yang tidak lengkap lagi tersimpan sebagai "Rapport betreffende beschadigen door bandjirs aangericht in

de Kloetgebieden der *Afdeeling* Blitar en Kediri”, terdapat dalam Koleksi *Departement der Burgelijke Openbare Werken (BOW) No. EV.76* ANRI Jakarta.

<sup>61</sup> Data 1906-1914 dikutip dari *Decentralisatie-Verslag 1913-1914*, hlm. 28-29; 1925-1928 dikutip dari *Decentralisatie-Verslag 1927-1928*, hlm. 36; 1939 dikutip dari *Begrooting van Uitgaven en Ontvangsten van de Stadsgemeente Blitar voor het Dienstjaar 1939*; 1940 dikutip dari *Begrooting van Uitgaven en Ontvangsten van de Stadsgemeente Blitar voor het Dienstjaar 1940*; 1942 dikutip dari *Begrooting van Uitgaven en Ontvangsten van de Stadsgemeente Blitar voor het Dienstjaar 1942*.

<sup>62</sup> A.P.E. Korver, *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?* (Jakarta: Grafitipers, 1985), hlm. 214 dan *Mengenang 50 Tahun Wafatnya H.O.S. Tjokroaminoto, 16 Agustus 1883-17 Desember 1934* (Jakarta: Yayasan Masagung, 1984), hlm. 23, dan *Koloniaal Verslag van 1917*, hlm. 1-2.

<sup>63</sup> Sugiono Soetomo, *Urbanisasi dan Morfologi, Proses Perkembangan Peradaban dan Wadah Ruang Fisiknya: Menuju Ruang Kehidupan yang Manusiawi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 161-165.

<sup>64</sup> Purnawan Basundoro, “Industrialisasi, Perkembangan Kota dan Respons Masyarakat: Studi Kasus Kota Gresik” dalam *Humaniora* Volume XIII No. 2/2001, hlm. 133.

<sup>65</sup> Untuk kepentingan tersebut pemerintah pusat menyelenggarakan beberapa kali Conferentie inzake Kampongverbetering untuk mengetahui berbagai persoalan yang timbul di lingkungan kampung di kota-kota, serta merumuskan kebijakan perbaikan dan penataan kampung (dan desa). Konferensi itu dikoordinasikan oleh Directeur van Binnenlandsch Bestuur bekerjasama dengan Adviseur v/d Decentralisatie, Inspecteur Agrarische Zaken, serta pihak terkait lainnya. Konferensi itu mempertemukan para *burgemeester*, *gemeenteraad*, *tehnische dienst*, dan sebagainya, antara lain diselenggarakan pada 11 Februari 1928 di Weltevreden, dan dihadiri oleh C.E. Barre,

Ketua *Gemeenteraad* van Blitar. Periksa “Verslag der Conferentie van den Adviseur voor de Decentralisatie met de *Burgemeester* en Voorzitters van *Gemeenteraden*, gehouden op Zaterdag 11 Februari 1928 te 9 uur v.m. in het gebouw van de Loge “De Ster in het Oostern”, Vrijmetselaarsweg 2 te Weltavreden” dalam Koleksi *Binnenlandsch Bestuur No. 1683* ANRI-Jakarta. Periksa Salinan surat dari De Hoodingenieur, Hoofd der Technische Afdeeling, Hoofdkantoor D.V.G. Afdeeling G (Gezondmakingswerken en Volkshuisvesting) (w.g.) J.H. Levert mengenai Verbetering der aan de *Gemeenten* over te dragen kampongs kepada Adviseur voor de Decentralisatie tertanggal 24 Agustus 1927, dalam Koleksi *Binnenlandsch Bestuur No. 1696* ANRI Jakarta.

<sup>66</sup> T.J. Bezemer (*et.al.* redacteurs), *Oosthoek's Geillustreerde Encyclopaedie Tweede Druk Deel II* (Utrecht: A. Oosthoek, 1925), hlm. 701.

<sup>67</sup> Departement van Economische Zaken, *Volkstelling 1930 Deel III Inheemsche Bevolking van Oost-Java* (Batavia: Landsdrukkerij, 1934), hlm. 3 dan E. De Bruyne, G.B.J. Hiltermann, H.R. Hoetink (Hoofdredactie), *Winkler Prins Encyclopaedie* Vierde Deel (Amsterdam: Elsevier, 1949), hlm. 302.

<sup>68</sup> Departement van Economische Zaken, *ibid.*, hlm. 11.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>71</sup> Data mengenai perkembangan ekonomi di *Gemeente* Blitar sangat sedikit yang berhasil ditemukan, sehingga gambaran komprehensif mengenai kondisi ekonomi juga susah direkonstruksi secara lebih memadai. Beberapa bukti fisik yang masih tersisa juga tidak dapat diketahui sejarahnya secara lebih lengkap karena tidak tersedia sumber tertulis maupun lisan.

<sup>72</sup> Ukuran luas tanah di Hindia Belanda, satu bau setara dengan kurang lebih 7.000 M<sup>2</sup>.

<sup>73</sup> Satu pikul tebu setara dengan 62,5 Kg.

<sup>74</sup> Pada 1903 di Surabaya dibuka ladang tebu seluas 32.077 bau dan dibangun 39 pabrik gula. Angka yang dirujuk dalam paragraf-paragraf ini perihal jumlah pabrik dan luas

---

ladang tebu per keresidenan berasal dari Dickooff 1919 seperti yang dikutip dalam Marieke Bloembergen, *op.cit.*, hlm. 129.

<sup>75</sup> Angka untuk Pasuruan diperoleh dari Elson 1984: 182. Angka untuk Kediri dari Van Moll 1913 seperti yang dikutip Marieke Bloembergen, *ibid.*

<sup>76</sup> Punt 5 *Notulen der openbare vergadering van Gemeenteraad van Blitar 28 Augst 1923.*